BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 52/KU.01.00/RA/01/2024

TENTANG

STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Panwaslu Kecamatan, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan;

b. bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaram dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024
PERTAMA	:	Menunjuk nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan/kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membantu PPK dalam mengelola keuangan di Panwaslu Kecamatan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ANDERSON

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Kepala KPPN Pekanbaru;
6. Kepala KPPN Dumai;
7. Kepala KPPN Rengat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	NIP, PANGKAT, & GOLONGAN RUANG	JABATAN/ KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Wahyu	19690525 201001 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku
39	Arianur Muharam	19840929 200801 1 003 Penata (III/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Batang Gansal
40	Yunidar, S.Pd.AUD	19700606 200701 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Lirik
41	Ricky Afrindra Putra	19860420 201001 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Kuala Cenaku
42	Supriaty, SE	19881028 201102 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala
43	Sumina, S.Pd	19750720 201406 1 005 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Lubuk Batu Jaya
44	Moh Bakeri	19820929 200701 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim
45	Mukhernis	19660704 198903 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Batang Peranap
IV	Kepulauan Meranti		
46	Ayu Kurniasari, A.Md	19840602 201407 2 005 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi
47	Miswanto, SE	19791211 201001 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat
48	Oktinigsih, SE	19821003 201407 2 002 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Timur
49	Ira Diana, SE	19860101 201407 2 003 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Rangsang
50	Siswanto, S.IP	19770330 201001 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Rangsang Barat
51	Sulastri, S.Pd	19860220 200903 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Rangsang Pesisir
52	Isnaini	19781017 200906 1 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Merbau
53	Sudarwindo, A.Ma	19841216 201407 1 003 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Pulau Merbau
54	Suhaimi, S.Ma	19781008 201001 1 012 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tasik Putri Puyu
V	Kampar		
55	Hendra Putra	19750721 200906 1 001 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu
56	Pan Hendri	19700414 200801 1 019 Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	NIP, PANGKAT, & GOLONGAN RUANG	JABATAN/ KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
137	Nurtanio	19760917 200012 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Enok
138	Okta Prativi Marta, S.Pd.I	19931026 202012 2 018 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Concong
139	Tri Juliarso, S.Pd.I	19910716 202012 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tempuling
140	Baharudin, SE	19740308 201001 1 010 Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Teluk Belengkong
141	Rosdianto	19791212 200902 1 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Kuala Indragiri
142	Jaswandi	19681116 200906 1 003 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tembilahan Hulu
143	Hairul Hapiz, S.Pd.I	19761209 201001 1 010 Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Gaung Anak Serka
144	Eli Yusmi	19831001 201001 2 026 Penata (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Kemuning
145	Lukman	19810515 201001 1 029 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Reteh
146	Mimi Fahlawati, S.Pd	19941110 202012 2 009 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Gaung
147	Revi Alamsyah, SH	19750118 200701 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tanah Merah
148	Mursalin, S.Pd	19910442 201902 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Pulau Burung
149	Nurdin, SE	19751120 200906 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Pelangiran
150	Samsul Aripin	19961005 202012 1 014 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Kateman
151	Siti Alsyah, S.Pd	19690101 200009 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Sungai Batang

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ANDERSON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner